



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOCH. MUCHLISIN**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **262591**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **3.080.000.000**

1. Tanah Seluas 3510 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, WARISAN
Rp. 215.000.000
2. Tanah Seluas 5600 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, WARISAN
Rp. 360.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/160 m2 di KAB / KOTA
LAMONGAN, WARISAN Rp. 325.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/45 m2 di KAB / KOTA
BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
6. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 105.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 920.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/100 m2 di KAB / KOTA
TEGAL, LAINNYA Rp. 475.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **546.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
340.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000



3. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000

4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HADIAH Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **58.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **77.546.811**

F. HARTA LAINNYA Rp. **1.050.000.000**

Sub Total Rp. **4.811.546.811**

III. HUTANG Rp. **553.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **4.258.546.811**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.